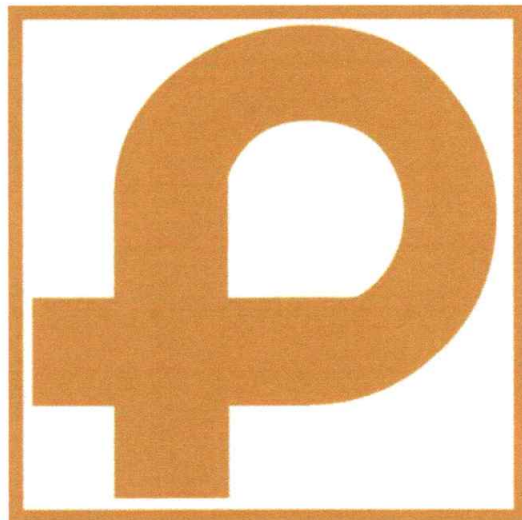


**LAPORAN TRANSPARANSI
PENERAPAN TATA KELOLA (GCG)
PT. BPR PRIMA NADI
TAHUN 2024**



**JL. A.A. Gde Ngurah No. 95 Cakranegara Mataram
TELEPON: 0370-637269**



PENJELASAN UMUM

Penerapan Tata Kelola dalam bidang usaha perbankan sangat penting mengingat bervariasinya serta peningkatan jumlah dan kompleksitas usaha yang semakin maju. PT BPR PRIMA NADI sebagai Bank yang melaksanakan fungsi intermediasi, harus mengimplementasikan prinsip-prinsip Tata Kelola atau Good Corporate Governance dalam setiap aspek pengelolaan perusahaan. Bank menyadari bahwa keberlangsungan eksistensi perusahaan tidak hanya diukur dari performa keuangan, dan peningkatan keuntungan, melainkan juga melalui performa internal perusahaan yaitu etika dan penerapan Good Corporate Governance. Melalui implementasi prinsip-prinsip GCG secara konsisten dan berkesinambungan diharapkan dapat memaksimalkan corporate value dan kepercayaan pasar. Hal ini dilakukan agar Bank memiliki daya saing yang kuat serta mampumenjaga kelangsungan usaha (sustainability) dalam jangka panjang sehingga visi dan misi perusahaan dapat tercapai.



LAPORAN TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA BPR

A. Ringkasan Hasil Penilaian (*Self Assessment*) Atas Penerapan Tata Kelola

Nama BPR	PT. BPR PRIMA NADI
Alamat	JL. A.A. Gde Ngurah No. 95 Cakranegara Mataram
Nomor Telepon	0370-637269
Posisi Laporan	31 Desember 2024
Peringkat Komposit	2
Predikat Komposit	Baik
Kesimpulan / Penjelasan	Manajemen BPR telah melakukan pelaksanaan tata kelola yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip tata kelola. Dalam hal terdapat kelemahan pelaksanaan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen BPR.

B. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi		
1.	Nama	:	Ni Putu Dewi Ekawati Lingga
	Jabatan	:	Direktur Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
Tugas dan tanggung jawab Direktur Utama yaitu: 1. Bersama Direktur yang lain bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR; 2. Bersama Direktur yang lain menyusun dan melaksanakan rencana strategis BPR baik jangka pendek (rencana kerja dan anggaran tahunan) maupun jangka panjang (tujuan, visi dan misi BPR); 3. Bersama Direktur yang lain membuat Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan BPR dan rencana kerja lainnya, kemudian menyampaikannya kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan; 4. Membuat dan menyampaikan Laporan Tahunan serta dokumen keuangan BPR lainnya sebagai wujud pertanggungjawaban pengurusan BPR, dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk disetujui dan disahkan; 5. Menyelenggarakan RUPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar BPR sebagai sarana mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Direksi kepada pemegang saham; 6. Dalam rangka mendukung terselenggaranya Tata Kelola, wajib memastikan terpenuhinya jumlah Sumber Daya Manusia yang memadai, antara lain dengan melakukan: a. Pemisahan tugas dan tanggung jawab antara satuan atau unit kerja yang membidangi pembukuan, operasional, dan kegiatan penunjang operasional lainnya; b. Menunjuk dan mengangkat Pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Audit Intern, dan independen terhadap unit kerja lain. 7. Memastikan hasil temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Audit Intern BPR, Auditor Ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan / atau otoritas lainnya telah ditindaklanjuti; 8. Memastikan penerapan Tata Kelola dalam setiap kegiatan usaha dan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi BPR;			



	9. Memastikan terlaksananya pembuatan dan penyampaian laporan baik laporan berkala atau laporan yang bersifat khusus, menurut cara, waktu dan format sesuai dengan ketentuan yang berlaku;	
2.	Nama	: Albertus Ary Utama
	Jabatan	: Direktur yang menjalankan fungsi kepatuhan
	Tugas dan Tanggung Jawab :	
	Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Operasional dan YMF Kepatuhan adalah sebagai berikut: 1. Bersama Direktur Utama dan Direktur lainnya merealisasikan rencana strategis BPR; 2. Menyusun sistem Akuntansi sesuai Standar Akuntansi Keuangan; 3. Membuat Daftar Pemegang Saham berikut daftar sahamnya, risalah RUPS dan risalah Rapat Direksi, serta mendokumentasikannya; 4. Tugas Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan yaitu memastikan BPR telah memnuhi terlaksananya seluruh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Perundang-undangan antara lain: a. Menjaga agar kegiatan usaha BPR tidak menyimpang dari peraturan; b. Menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat kepada Otoritas; c. Mencegah Direksi BPR untuk menetapkan kebijakan dan/ atau keputusan yang menyimpang dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau Perundang – undangan; d. Menyampaikan laporan pokok-pokok pelaksanaan tugas anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan dan laporan khusus mengenai kebijakan dan/ atau keputusan Direksi yang menurut pendapatnya menyimpang dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau Perundang – undangan lainnya; 5. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu sesuai dengan bidang tugasnya serta memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan atau yang diminta oleh anggota Dewan Komisaris; 6. Mengarahkan, membimbing, mensupervisi dan mendorong Pejabat Eksekutif dan seluruh staf dibawahnya untuk memberikan kinerja terbaik sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing; 7. Melakukan penilaian kinerja terhadap Pejabat Eksekutif dibawahnya; 8. Memastikan kecukupan dan kesesuaian pedoman, sistem dan prosedur internal BPR; 9. Melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya secara berkala kepada Direktur Utama; dan	
3.	Nama	: I Gusti Ketut Sri Putranta
	Jabatan	: Direktur
	Tugas dan Tanggung Jawab :	
	Tugas dan tanggung jawab Direktur Kredit yaitu: 1. Memberikan arahan, bimbingan dan supervisi kepada Pejabat Eksekutif dan seluruh staf di bawahnya berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab masing masing mulai dari kegiatan proses kredit, pembinaan kredit dan penanganan kredit bermasalah; 2. Menyelenggarakan rapat komite Kredit; 3. Memastikan dan mengevaluasi dengan seksama terhadap setiap portofolio kredit sesuai dengan pedoman, sistem dan prosedur yang berlaku sehingga mampu mengamankan perusahaan dari timbulnya risiko kredit; 4. Melakukan koordinasi dan mengarahkan unit kerja terkait dalam hal penanganan kredit bermasalah; 5. Membuat perencanaan dan melakukan langkah – langkah konkrit untuk meningkatkan kualitas portofolio kredit; 6. Melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya secara berkala kepada Direktur Utama; 7. Mengusahakan agar setiap penyaluran kredit menghasilkan pendapatan yang optimal; 8. Mengarahkan dan mendorong Pejabat Eksekutif dan seluruh Staf dibawahnya untuk memberikan kinerja yang terbaik sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan dengan tetap berpedoman pada ketentuan yang berlaku; 9. Melakukan evaluasi dan kajian terkait pengembangan unit kerja dibawahnya agar tercipta iklim dan tim kerja yang baik sehingga hasil kerja efektif dan optimal; 10. Melakukan penilaian kinerja kepada Pejabat Eksekutif dibawahnya; 11. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu sesuai dengan bidang tugasnya serta memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan atau yang diminta oleh anggota Dewan Komisaris.	



Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris :
Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris***): Direksi telah menindaklanjuti rekomendasi Dewan Komisaris di tahun 2024 yaitu: 1. Direksi senantiasa mematuhi seluruh ketentuan yang berlaku serta berpedoman pada RBB yang telah disetujui dalam setiap kegiatan operasional BPR. 2. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap SOP, Kebijakan maupun Surat Keputusan dan Memo Direksi; 3. Melakukan Evaluasi terhadap hasil kinerja selama tahun 2024; 4. Pemberian dan perpanjangan kredit BWMK Kepala Cabang, Kabag Bisnis Corporate dan retail 5. Telah dilakukan kajian risiko terhadap penempatan dana antar bank untuk memperoleh hasil yang optimal; 6. Upaya penyelesaian kredit bermasalah dengan lelang atau penjualan agunan. 7. Target penurunan kredit bermasalah dan pertumbuhan kredit baru. 8. Upaya penyelesaian permasalahan AYDA dan tetap melakukan perawatan terhadap AYDA dengan baik 9. Pelaksanaan APU, PPT dan PPPSPM sesuai dengan peraturan perundangan terkini. 10. Penunjukan Akuntan Publik dan kantor Akuntan Publik.
Penjelasan Lebih Lanjut :
RBB menjadi pedoman dalam operasional BPR, pemutusan kebijakan, dan pengendalian perusahaan.

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris		
1.	Nama	:	Ronny Abdikesuma
	Jabatan	:	Komisaris
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
1. Mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR; 2. Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik pada seluruh kegiatan usaha BPR; 3. Melakukan pengawasan dan memberikan nasihat terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi; 4. Memastikan Direksi menindaklanjuti temuan dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/ atau otoritas lainnya; 5. Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak ditemukannya pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan, keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR; 6. Memberikan pertimbangan atas usulan Direktur Utama BPR dalam hal pengangkatan dan pemberhentian Pejabat Eksekutif Audit Intern; 7. Dalam penerapan Manajemen Risiko, antara lain menyetujui, memastikan dan mengevaluasi kebijakan serta pertanggungjawaban pelaksanaan penerapan Manajemen Risiko oleh Direksi serta mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris; 8. Setiap anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab penuh secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan adanya kesalahan atau kelalaian dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan, kecuali (i) dapat dibuktikan bahwa kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya, (ii) telah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan BPR, (iii) tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian, dan (iv) telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.			
2.	Nama	:	Ida Komang Suwignya
	Jabatan	:	Komisaris
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
1. Mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR; 2. Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik pada seluruh			



kegiatan usaha BPR;

3. Melakukan pengawasan dan memberikan nasihat terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
4. Memastikan Direksi menindaklanjuti temuan dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/ atau otoritas lainnya;
5. Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak ditemukannya pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan, keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR;
6. Memberikan pertimbangan atas usulan Direktur Utama BPR dalam hal pengangkatan dan pemberhentian Pejabat Eksekutif Audit Intern;
7. Dalam penerapan Manajemen Risiko, antara lain menyetujui, memastikan dan mengevaluasi kebijakan serta pertanggungjawaban pelaksanaan penerapan Manajemen Risiko oleh Direksi serta mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris;
8. Setiap anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab penuh secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan adanya kesalahan atau kelalaian dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan, kecuali (i) dapat dibuktikan bahwa kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya, (ii) telah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan BPR, (iii) tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian, dan (iv) telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

3.	Nama	:	Thony Wijaya
	Jabatan	:	Komisaris Utama

Tugas dan Tanggung Jawab :

1. Mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR;
2. Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik pada seluruh kegiatan usaha BPR;
3. Melakukan pengawasan dan memberikan nasihat terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
4. Memastikan Direksi menindaklanjuti temuan dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/ atau otoritas lainnya;
5. Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak ditemukannya pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan, keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR;
6. Memberikan pertimbangan atas usulan Direktur Utama BPR dalam hal pengangkatan dan pemberhentian Pejabat Eksekutif Audit Intern;
7. Dalam penerapan Manajemen Risiko, antara lain menyetujui, memastikan dan mengevaluasi kebijakan serta pertanggungjawaban pelaksanaan penerapan Manajemen Risiko oleh Direksi serta mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris;
8. Setiap anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab penuh secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan adanya kesalahan atau kelalaian dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan, kecuali (i) dapat dibuktikan bahwa kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya, (ii) telah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan BPR, (iii) tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian, dan (iv) telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Rekomendasi Kepada Direksi :

1. Lakukan digitalisasi dalam menghadapi persaingan kedepannya. Referensi tentang digitalisasi yang sesuai dengan kebutuhan BPR agar segera di jajaki dengan baik.
2. Penyaluran kredit harus dilihat dan dievaluasi dengan baik market yang ada, sasaran yang akan dituju dan market intern.
3. Lakukan mapping area disekitar lokasi kantor, segmen pasar mana yang bisa kita garap agar dilihat dan dievaluasi dengan baik.



4. Membuat rincian kredit bermasalah disertai dengan nilai jaminan serta progresnya dan usulan solusi penurunan NPL serta penggunaan lawyer untuk membantu penanganan kredit bermasalah.
5. AYDA yang ada agar dirawat dengan baik dan segera mungkin dilakukan penjualan.
6. Segera mengisi struktur organisasi yang kosong serta menyusun rencana pelatihan kepada karyawan yang meminta masukan dari para Pejabat Eksekutif.
7. Secara bertahap dapat menerapkan analisa kredit dengan sistem scoring dimana tentunya harus dibangun terlebih dahulu kesepakatan terkait dengan standar penilaian yang akan digunakan.
8. Usulan terhadap skim kredit yang baru agar dilakukan kajian yang mendalam terlebih dahulu serta menetapkan prioritas mana yang dapat dilaksanakan.
9. Agar dilakukan inventarisasi terhadap ketentuan internal, baik berupa kebijakan, SOP maupun SK dan Memo Direksi yang ada serta dibuatkan time line proses pengkiniannya.
10. Lakukan kajian risiko terhadap penempatan dana antar bank untuk memperoleh hasil yang optimal.
11. Perlu dikaji kembali dalam rangka melakukan promosi/branding untuk membuat program tabungan berhadiah.
12. Agar dilihat dan dievaluasi suku bunga kredit dari pesaing yang ada.
13. Memperhatikan sektor mana yang masih punya peluang untuk dikembangkan dan sektor mana yang harus dihindari.

Penjelasan Lebih Lanjut :

Nihil

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite (jika ada)

a. Tugas dan Tanggung Jawab Komite

No.	Tugas dan Tanggung Jawab Komite
1.	Komite Audit
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Tidak ada
2.	Komite Pemantau Risiko
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Tidak ada
3.	Komite Remunerasi dan Nominasi
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Tidak ada
Tindak Lanjut Rekomendasi Tugas dan Tanggung Jawab Komite	
BPR tidak memiliki Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Remunerasi dan Nominasi	

b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite

No.	Nama	Keahlian	Jabatan di Komite	Pihak Independen
1.				
2.				
3.				
Tindak Lanjut Rekomendasi Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite		:	BPR tidak memiliki Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Remunerasi dan Nominasi	



c. Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite

No.	Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite		
1.	Komite Audit		
	Program	:	-
	Realisasi	:	-
	Jumlah Rapat	:	-
2.	Komite Pemantau Risiko		
	Program	:	-
	Realisasi	:	-
	Jumlah Rapat	:	-
3.	Komite Remunerasi dan Nominasi		
	Program	:	-
	Realisasi	:	-
	Jumlah Rapat	:	-
Penjelasan Lebih Lanjut			
BPR tidak memiliki Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Remunerasi dan Nominasi.			

B. Kepemilikan Saham Direksi

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Ni Putu Dewi Ekawati Lingga	Rp0	0%
2.	Albertus Ary Utama	Rp0	0%
3.	I Gusti Ketut Sri Putranta	Rp0	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :			
Anggota Direksi, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama tidak ada yang memiliki saham di BPR Prima Nadi.			



2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No.	Nama Direksi	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Ni Putu Dewi Ekawati Lingga	-	-	0%
2.	Albertus Ary Utama	-	-	0%
3.	I Gusti Ketut Sri Putranta	-	-	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Anggota Direksi, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama tidak ada yang memiliki saham di perusahaan lain.				

C. Hubungan Keuangan dan/ atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Direksi Lain, Anggota Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Ni Putu Dewi Ekawati Lingga	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	Albertus Ary Utama	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
3.	I Gusti Ketut Sri Putranta	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Anggota Direksi PT. BPR Prima Nadi tidak memiliki hubungan keuangan dengan anggota Direksi Lain, Anggota Dewan Komisaris dan Pemegang Saham.				

2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Ni Putu Dewi Ekawati Lingga	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	Albertus Ary Utama	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
3.	I Gusti Ketut Sri Putranta	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Anggota Direksi PT. BPR Prima Nadi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan anggota Direksi Lain, anggota Dewan Komisaris dan Pemegang Saham.				



D. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Ronny Abdikesuma	Rp900.000.000	10%
2.	Ida Komang Suwignya	Rp0	0%
3.	Thony Wijaya	Rp3.600.000.000	40%

Penjelasan Lebih Lanjut :

Dari 3 (tiga) orang anggota Komisaris, terdapat 2 (dua) orang anggota komisaris yang merupakan Pemegang Saham PT. BPR Prima Nadi yaitu Tn. Thony Wijaya sebesar 40% dan Tn. Ronny Abdikesuma sebesar 10%.

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No.	Nama Dewan Komisaris	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Ronny Abdikesuma	601062	PT. BPR Prima Dewata	10%
2.	Ronny Abdikesuma	602706	PT BPR Prima Sejahtera	10%
3.	Thony Wijaya	602706	PT BPR Prima Sejahtera	45%
4.	Thony Wijaya	601062	PT. BPR Prima Dewata	45%

Penjelasan Lebih Lanjut :

Dari 3 (tiga) orang anggota Komisaris terdapat 2 (dua) orang anggota Komisaris PT. BPR Prima Nadi yaitu Tn. Thony Wijaya dan Tn. Ronny Abdikesuma memiliki saham pada BPR lain yaitu pada PT. BPR Prima Dewata dan PT. BPR Prima Sejahtera dengan komposisi kepemilikan sebagaimana data tersebut diatas.

E. Hubungan Keuangan dan/ atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Dewan Komisaris Lain, Anggota Direksi dan/ atau Pemegang Saham BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1.	Ronny Abdikesuma	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	Ida Komang Suwignya	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
3.	Thony Wijaya	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut :



Tidak terdapat hubungan keuangan antara Dewan Komisaris PT. BPR Prima Nadi dengan anggota Dewan Komisaris Lain, anggota Direksi dan Pemegang Saham.

2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1.	Ronny Abdikesuma	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	Ida Komang Suwignya	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
3.	Thony Wijaya	Tidak ada	Tidak ada	Yasin Wijaya - Kakak Kandung, Linda Trisnawati - Ibu Kandung

Penjelasan Lebih Lanjut :

Sebagaimana data tabel diatas dapat disampaikan bahwa;

1. Tidak terdapat hubungan keluarga antara Dewan Komisaris dengan anggota Dewan Komisaris yang lain;
2. Tidak terdapat hubungan keluarga Dewan Komisaris dengan anggota Direksi;
3. Dari 3 (tiga) orang anggota Komisaris terdapat 1 (satu) orang anggota Komisaris yaitu Tn.Thony Wijaya memiliki hubungan keluarga dengan Pemegang saham PT. BPR Prima Nadi.

F. Paket/ Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

1. Paket/Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1.	Gaji	3	Rp460.146.228	3	Rp479.278.512
2.	Tunjangan	2	Rp72.960.000	0	Rp0
3.	Tantiem	0	Rp0	0	Rp0
4.	Kompensasi Berbasis Saham	0	Rp0	0	Rp0
5.	Remunerasi Lainnya	0	Rp0	0	Rp0
Total			Rp533.106.228		Rp479.278.512

Penjelasan Lebih Lanjut :

- A. Paket/ Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
- B. 3 (tiga) orang Direksi dan 3(tiga) orang Dewan Komisaris mendapatkan Gaji Pokok.
- C. 2 (dua) orang Direksi mendapatkan Tunjangan Kesejahteraan dan Tunjangan Jabatan.



2. Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1.	Perumahan	Tidak ada	Tidak ada
2.	Transportasi	Kendaraan Roda 4 (3)	Kendaraan Roda 4 (1)
3.	Asuransi Kesehatan	Tidak ada	Tidak ada
4.	Fasilitas Lainnya	Tidak ada	Tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut :

Fasilitas lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris PT. BPR Prima Nadi dalam bentuk Transportasi kendaraan roda empat dengan rincian sebagai berikut :

1. Ida Komang Suwignya merk kendaraan yang digunakan Daihatsu Xenia
2. Ni Putu Dewi Ekawati Lingga merk kendaraan yang digunakan Chevrolet Captiva
3. I Gusti Ketut Putranta merk kendaraan yang digunakan KIA Sportage MT
4. Albertus Ary Utama merk kendaraan yang digunakan Daihatsu Terios

Untuk Fasilitas lainnya berupa Perumahan, Asuransi Kesehatan dan Fasilitas Lainnya tidak diberikan.

G. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

Keterangan	Perbandingan
	(a/b) : 1
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	4.6 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1.2 : 1
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1.1 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	1.1 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	1.9 : 1

Penjelasan Lebih Lanjut :

Rasio Gaji yang menjadi perbandingan adalah imbalan yang di terima oleh anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan Pegawai.

H. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

1. Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) tahun

No.	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1.	11 Januari 2024	3	Evaluasi Kinerja Bulan Desember 2023
2.	23 April 2024	3	Pembahasan Masalah BPR



3.	10 Juli 2024	3	Evaluasi Kinerja Dan Isu isu Strategis
4.	18 September 2024	3	Isu-isu dan Kebijakan Strategis BPR,serta penerapan program APU,PPT dan PPPSPM
5.	29 November 2024	3	Rencana Bisnis Bank Tahun 2025
Penjelasan Lebih Lanjut Pelaksanaan Rapat dalam 1 tahun :			
Dalam tahun 2024 Dewan Komisaris melaksanakan Rapat sebanyak 5 (lima) kali. Dari 5 (lima) kali pelaksanaan rapat, dihadiri secara fisik oleh 3 (tiga) orang anggota komisaris.			

2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

No.	Nama Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
		Fisik	Telekonferensi	
1.	Ronny Abdikesuma	5	0	100%
2.	Ida Komang Suwignya	5	0	100%
3.	Thony Wijaya	5	0	100%
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Pada tahun 2024, dari 5 (kali) kali pelaksanaan rapat Dewan Komisaris, dihadiri oleh semua anggota dewan Komisaris.				

I. Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud)

Jumlah Penyimpangan Internal*) (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (Satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Diselesaikan		0		0		0		0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		0		0		0		0
Penjelasan Lebih Lanjut :								
Tidak terdapat Fraud tahun 2024								

R 9 9



J. Permasalahan Hukum yang Dihadapi

Permasalahan Hukum	Jumlah (Satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai	0	2
Dalam Proses Penyelesaian	12	12
Total	12	14
Penjelasan Lebih Lanjut		
<ol style="list-style-type: none">1. Sidang Pajak, saat ini proses banding di tingkat Mahkamah Agung;2. 2 (dua) orang Debitur saat ini sedang menjalani hukuman Penjara;3. Banding dari Debitur atas Putusan Tingkat Pertama;4. Gugatan dari Debitur yang saat ini dalam tahap persidangan;5. Proses Penyidikan terhadap Debitur;6. Proses Anmaning oleh Pengadilan;		

K. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

No.	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan		Pengambil Keputusan		Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	Nama	Jabatan	Nama	Jabatan			
1.							
2.							
3.							
Penjelasan Lebih Lanjut :							
Pada tahun 2024, tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan							

L. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

No.	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/ Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
1.	01 Maret 2024	Sosial	SUMBANGAN PAWAI OGOH OGOH MENYAMBUT HARI RAYA NYEPI	Masyarakat	Rp500.000
2.	26 Februari 2024	Sosial	SUMBANGAN PAWAI OGOH OGOH	Masyarakat	Rp150.000
3.	13 Maret 2024	Sosial	SUMBANGAN KEGIATAN SAFARI RAMADHAN DI KLU	Masyarakat	Rp500.000
4.	02 April 2024	Sosial	SANTUNAN UNTUK PANTI ASUHAN Dan FUQORO	Panti Asuhan	Rp1.000.000
5.	03 April 2024	Sosial	SANTUNAN UNTUK ANAK YATIM YAYASAN SEMUDANE	Panti Asuhan Gerung	Rp150.000



			DI GERUNG		
6.	04 April 2024	Sosial	SUMBANGAN BERAS 50 Kg UNTUK MASJID AT TAQWA SEGANTENG, 50 Kg UNTUK MASJID JAMI QOBATUL ISLAM	Masyarakat	Rp1.380.000
7.	05 April 2024	Sosial	SUMBANGAN BERAS 50 Kg UNTUK MASJID GERUNG	Masyarakat	Rp650.000
8.	26 April 2024	Sosial	SUMBANGAN DANCE PSMTI	Masyarakat	Rp1.000.000
9.	06 Mei 2024	Sosial	KEGIATAN LOMBOK HASH HOUSE HARRIES (LHHH)	Masyarakat	Rp5.000.000
10.	14 Mei 2024	Sosial	KEGIATAN HARI BPR/ BPRS NTB	Bendahara Perbarindo NTB	Rp4.000.000
11.	24 Juni 2024	Sosial	SANTUNAN UNTUK PANTI ASUHAN	Panti Asuhan	Rp2.000.000
12.	27 Juni 2024	Sosial	SUMBANGAN DHARMASANTI WAISAK	Masyarakat	Rp500.000
13.	16 Agustus 2024	Sosial	SUMBANGAN HUT RI KE 79 DI PANCOR	Masyarakat	Rp300.000
14.	09 Oktober 2024	Sosial	SUMBANGAN ACARA TILAWATIL QUR'AN DI LOBAR	Masyarakat	Rp200.000
15.	07 November 2024	Sosial	SUMBANGAN KEGIATAN GEBYAR KREATIFITAS DI CAB. TANJUNG	Masyarakat	Rp500.000

Penjelasan Lebih Lanjut Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

Selama tahun 2024 Bank tidak pernah memberikan dana untuk kegiatan politik, Bank hanya memberikan dana untuk sumbangan/partisipasi. Pemberian bantuan dana sumbangan/partisipasi yang dilakukan oleh BPR Prima Nadi merupakan wujud kepedulian dan tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan sosial berupa sumbangan dan donasi lainnya.

Mataram, 20 Januari 2024

PT. BPR PRIMA NADI

Disetujui Oleh


Thony Wijaya
Komisaris Utama


Ni Putu Dewi Ekawati Lingga
Direktur Utama